

## MODAL SOSIAL PESANTREN JAWA PESISIRAN UTARA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus di Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati)

**A. Zaenurrossyid**

Pakar Peneliti Keislaman Pesisir Utara Jawa  
Email: zaenurrosyid79@gmail.com

**Ahmad Nuruddin**

Peneliti di *Pesantren and Indonesian Islamic Studies-*  
Forum Perguruan Tinggi Pesantren  
Email: nuruddina23@gmail.com

### **Abstract**

*Kiai and pesantren are acknowledged to have contributed a lot in solving the problems of community welfare, especially in socio-religious and economic matters in Indonesia. The existence of pesantren so far has not only been insulated on its duties in managing morals and arranging itself as a tafaqquh fiddin institution that is indifferent to various social dynamics that develop. On the contrary, pesantren are actually responsive and progressive in addressing these issues with concrete work in the direct grassroots realm. Kiai Sabal and Maslakul Huda are examples of how kiai and pesantren figures institutionally contribute to answering social issues. Various activities carried out by the Maslakul Huda Islamic Boarding School are a form of crystallization of Kiai Sabal's ideas in order to respond to the actual social problems of the lower class of Kajen Village and its surroundings. Norms, the social networks in the figure of Kiai Sabal and the Pesantren Maslakul Huda, in this case have succeeded in fostering public trust which in the later stages has made it easier for the Islamic Boarding School Maslakul Huda to instill religious values in their communities. This study tries to see how the social capital in Kiai Sabal and the Islamic Boarding School Maslakul Huda is able to bring success in realizing community welfare. The results of this study mention that community empowerment carried out by Kiai Sabal and the Pesantren Maslakul Huda participated in the process of transforming people's welfare through various activities and institutions under the auspices of the Maslakul Huda Islamic Boarding School Foundation.*

**Keywords:** *Kiai Sabal, Pesantren Maslakul Huda, Social Capital, Community Empowerment.*

### **Abstrak**

*Kiai dan pesantren diakui telah banyak berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat, utamanya dalam sosial keagamaan dan ekonomi di Indonesia. Eksistensi pesantren selama ini tidak hanya tersekat pada tugasnya dalam menata akhlak dan menata diri sebagai lembaga tafaqquh fiddin yang abai terhadap berbagai dinamika sosial kemasyarakatan yang berkembang. Sebaliknya, pesantren justru responsif dan progresif dalam menyikapi persoalan-persoalan tersebut dengan kerja*

*konkret pada ranah akar rumput langsung. Kiai Sahal dan Pesantren Maslakul Huda adalah contoh bagaimana figur kiai dan pesantren secara institusi turut andil dalam menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan. Berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Pesantren Maslakul Huda adalah bentuk kristalisasi ide Kiai Sahal dalam rangka merespon problematika sosial aktual kemasyarakatan kelas bawah Desa Kajen dan sekitarnya. Norma, jaringan sosial yang ada dalam figur Kiai Sahal dan Pesantren Maslakul Huda, dalam hal ini telah berhasil menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang pada tahapan selanjutnya telah memudahkan Pesantren Maslakul Huda menanamkan nilai-nilai agama kepada masyarakatnya. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana modal sosial yang ada di Kiai Sahal dan Pesantren Maslakul Huda mampu membawa pada keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyebutkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kiai Sahal dan Pesantren Maslakul Huda turut serta dalam proses transformasi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan institusi yang bernaung di bawah Yayasan Pesantren Maslakul Huda.*

**Keywords:** *Kiai Sahal, Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat.*

## **A. Pendahuluan**

Pondok Pesantren atau yang biasa disebut Pesantren<sup>1</sup> merupakan lembaga pendidikan dan sosial keagamaan dengan *tafaqquh fiddin* sebagai fungsi utama.<sup>2</sup> Eksistensi pesantren dalam mewarnai masyarakat sejak pada mula berdirinya hingga saat ini menjadikan pesantren selalu dapat diterima dan mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat.<sup>3</sup> Bukan sesuatu yang baru apabila keberadaan pesantren mampu membawa perubahan terhadap masyarakat di sekitarnya, selain karena kehadirannya di tengah-tengah masyarakat dianggap membawa perubahan baik dari aspek pendidikan, kultur, maupun ekonomi dalam suatu komunal masyarakat menjadi lebih baik, juga dapat dilihat dari peran alumninya yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang mampu menjadi agen perubahan tidak hanya di bidang keilmuan saja, tetapi juga dibarengi dengan kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah lingkungan dan sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesantren berarti tempat santri atau murid-murid belajar mengaji. Zamakhsyari Dlofier dalam *Tradisi Pesantren* (1994) secara etimologis menjelaskan, pondok pesantren terdiri dari kata pondok dan pesantren, pondok dari kata *funduq* yang berarti asrama atau hotel dan pesantren berangkat dari kata santri yang diawali dengan pe- dan diakhiri dengan -an.

<sup>2</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 257.

<sup>3</sup> Rusydi Sulaiman, *Pendidikan Pondok Pesantren*, Jurnal 'Anil Islam Vol. 1 (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman, 2016) hlm. 4.

<sup>4</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh.*, hlm. 334.

Sebagaimana sering dijumpai beberapa pondok pesantren memiliki kepekaan yang tinggi terhadap wacana kesejahteraan masyarakat. Pondok Pesantren An Nuqayyah Guluk-guluk Sumenep Madura, Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Pondok Pesantren Darul Falah Bogor adalah sebagian contoh pesantren yang memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap wacana kesejahteraan masyarakat, sebagian pesantren tersebut memiliki lembaga khusus yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau memiliki program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.<sup>5</sup>

Meskipun secara umum konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren bukan sesuatu yang familiar di kalangan pesantren, akan tetapi pada dasarnya pesantren dengan pemberdayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang terpisahkan. Pesantren selain memiliki fungsi sebagai lembaga yang mendidik santrinya memahami ilmu agama dan akhlak juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini dianggap sebagai upayanya untuk bersenyawa dengan masyarakat dan menjadi bagian integral dari masyarakat. Dengan fungsinya sebagai institusi pemberdayaan masyarakat, pesantren kemudian membuktikan diri menjadi institusi yang peduli terhadap kondisi sosial (utamanya ekonomi) masyarakat. Dibuktikan dengan ragam bentuk kegiatan pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat.

Dengan semangat pemberdayaan masyarakat, pesantren menjadi contoh bagaimana suatu lembaga mampu bertahan dengan berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sebagai bentuk aktualisasi prinsip yang dipelajari di pesantren, yakni *al Muhafadzatu 'ala al Qadiimi ash Shalih, wa al Akhdzu bi al Jadiidi al Ashlah*, konservatif terhadap tradisi lama yang dianggap masih relevan serta akomodatif terhadap hal-hal baru yang lebih progresif. Eksistensi pesantren tidak hanya tersekat pada tugas utamanya dalam mencerdaskan dan menata akhlak santri, tetapi juga membekali santrinya mampu beradaptasi sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks wacana kesejahteraan masyarakat, kyai-pesantren menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, selain memberikan motivasi

<sup>5</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Peran Pesantren dalam Kemerdekaan dan Menjaga NKRI*, (Yogyakarta: Aswajaperindo, 2016), hlm. 188-189.

<sup>6</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh.*, hlm. 350.

keagamaan maupun sosial, keberadaan kyai-pesantren sekaligus mampu mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai keseimbangan antara materiil dan spiritual.<sup>7</sup>

Pondok Pesantren Maslakul Huda adalah salah satu pesantren yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus solutif-implementatif terhadap problematika yang berkembang di tengah masyarakat. Adalah Kiai Sahal Mahfudh<sup>8</sup> sebagai *madzhab* pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren.<sup>9</sup> Gagasan-gagasan beliau dalam wacana kesejahteraan masyarakat ini terejawantahkan melalui pesantren yang diasuhnya, Pondok Pesantren Maslakul Huda. Selama rentang waktu tahun 1979-2008<sup>10</sup> Pondok Pesantren Maslakul Huda telah aktif mengupayakan berbagai kegiatan-kegiatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai pendekatan. Penelitian ini berusaha menemukan bagaimana bentuk-bentuk modal sosial yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Maslakul Huda yang digunakan sebagai modal menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana kemudian Pondok Pesantren Maslakul Huda mendayagunakan modal sosial tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## B. Landasan Teori

Berdirinya pondok pesantren sebagai komunitas tersendiri di tengah masyarakat menjadikannya memiliki kekuatan untuk melakukan gerakan-gerakan selain

---

<sup>7</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh...*, hlm. XXXI.

<sup>8</sup> Nama lengkap beliau KH. MA. Sahal Mahfudh (1937-2014), familiar dikenal dengan Kyai Sahal, adalah pengasuh kedua PP. Maslakul Huda pada periode 1963-2014 menggantikan KH. Mahfudh Salam. Selain pengasuh PP. Maslakul Huda, beliau juga menjadi Direktur di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati (1963-2014) dan *Ra'is 'Aam* PBNU periode 2000-2014. Lihat Jamal Ma'mur dkk., *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom, Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad)*, (Pati: Perguruan Islam Mathali'ul Falah, 2012), hlm.

<sup>9</sup> Kyai Sahal banyak menyampaikan gagasan-gagasannya mengenai pesantren dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dalam beberapa artikel, makalah maupun opini yang tersebar di majalah dan surat kabar. Salah satunya adalah di dalam buku *Nuansa Fiqh Sosial* (1994). Dalam buku ini KH. MA. Sahal Mahfudh mengutarakan mengenai paradigma masyarakat yang menggunakan fiqh sebagai alat justifikasi halal-haram, serta menganggap fiqh sebagai teks *sacral* dan tidak lagi elastis yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan fiqh dalam menjawab problematika sosial. Menurut beliau, fiqh sebagai teks panduan kehidupan paling praktis dalam Islam mampu dan masih relevan dalam mengatasi permasalahan aktual.

<sup>10</sup> Periode ini adalah fase di mana Pesantren Maslakul Huda mendirikan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang diinisiasi Kiai Sahal untuk melakukan kegiatan pengembangan masyarakat berbasis pesantren. Sampai pada tahun 2008, lembaga ini telah dibubarkan dengan alasan secara kelembagaan sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang semakin berkembang.

keagamaan, khususnya di ranah sosial. Kekuatan tersebut kemudian menjadi basis modal bagi pondok pesantren untuk menjalin berbagai bentuk kerjasama yang produktif bersama masyarakat.<sup>11</sup> Pola kerjasama produktif pondok pesantren-masyarakat ini kemudian mengharuskan untuk meneliti tentang modal sosial pesantren yang telah menjadikan pondok pesantren sebagai lembaga strategis basis pemberdayaan masyarakat.

Pesantren sebagai lembaga *Tafaqquh Fiddin*, lembaga tarbiyah, lembaga sosial, gerakan kebudayaan dan bahkan sebagai kekuatan politik<sup>12</sup> adalah lembaga yang sangat terbuka dan adaptif terhadap perubahan-penyempurnaan dalam survivalitasnya mengarungi zaman. Eksistensi pesantren secara kelembagaan, dari mulai lembaga yang diyakini bentuk adaptasi budaya Hindhu-Islam hingga lembaga yang telah memiliki pendidikan formal dan Perguruan Tinggi, tidaklah hadir secara instan begitu saja, melainkan konstruksi antara nilai dan norma (*norms*), jejaring sosial (*social networks*), dan kepercayaan (*trust*) yang terbangun secara *simbiosis mutuals* antara pesantren-masyarakat. Tiga poin ini kemudian disebut sebagai modal sosial yang dimiliki oleh pesantren.

Modal sosial sendiri pada mulanya dipahami sebagai suatu bentuk modal dimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada kelompok atau individu sebagai bagian di dalamnya.<sup>13</sup> Secara historis, Pierre Bourdieu adalah yang pertama kali mendefinisikan modal sosial dengan menyebutkan “setiap individu memiliki posisi dalam ruang sosial yang dimensional”. Ia memfokuskan penelitiannya pada pengertian ‘tataran sosial’ dan beranggapan bahwa modal sosial saling berkaitan dengan modal lainnya, seperti modal ekonomi dan budaya. Ketiganya akan berfungsi efektif jika saling berkaitan. Dalam konteks relasi sosial, wujud dari ketiga modal tersebut adalah garansi dari kuatnya suatu ikatan relasi sosial.<sup>14</sup> Adapun Francis Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang

<sup>11</sup> M. Sulton Fatoni, *Modal Sosial Pesantren (Studi tentang Komunitas Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), hlm. 26.

<sup>12</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh.*, hlm. 305.

<sup>13</sup> M. Sulton Fatoni, *Modal Sosial Pesantren...*, hlm. 26.

<sup>14</sup> Muhammad Ghufroon, *Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Toleransi dalam Relasi Sosial Sunni-Syiah di Perkampungan Candi Desa Banjaran Jepara*, Skripsi, (Pati: Institut Pesantren Mathali’ul Falah, 2017). Lihat juga John Field, *Social Capital*, (Canada: Roudledge, 2008), hlm. 17.

memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka.<sup>15</sup> Dia juga menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern dan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan manusia, ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi.

Robert D. Putnam sebagaimana dikutip oleh Ah. Zaenurrosyid, mengatakan bahwa modal sosial dipandang sebagai perangkat hubungan horizontal antar orang. Lebih lanjut, menurut Putnam modal sosial adalah “*similar to the notions of physical and human capital the term social refers to features of social organization—such as network, norms, and trust that increase a society’s productive potential*”.<sup>16</sup> Modal sosial memuat aspek *norms* atau norma yang meliputi nilai-nilai bersama, aturan-aturan dan sanksi, *social network* atau jaringan sosial dengan unsur-unsur meliputi partisipasi, resiprositas, solidaritas, kerjasama, dan *trust* atau kepercayaan (kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi dan kemurahan hati). Ketiga unsur modal sosial beserta aspek-aspeknya tersebut harus ada dalam kehidupan sosial manapun, baik itu komunitas, suku, bangsa, masyarakat atau yang lainnya,<sup>17</sup> karena dengan aspek-aspek tersebut memungkinkan siapapun yang memilikinya untuk memperoleh keuntungan (*mutual benefit*).<sup>18</sup> Dengan demikian dapat dikatakan relasi yang terjalin antara pesantren dan masyarakat telah menyentuh pada aspek ikatan-ikatan sosial dan kepercayaan pesantren-masyarakat yang mengakar kuat serta memunculkan keuntungan yang dinikmati keduanya.

### C. Metode Penelitian

Secara mendasar metode penelitian adalah penyusunan kerangka penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Adapun dalam metode penelitian terdiri dari jenis, sifat dan pendekatan penelitian, serta pengumpulan, analisa dan penyajian data.

---

<sup>15</sup> Francis Fukuyama, *Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1995) hlm. 46. Lihat juga Ah. Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran*, (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2016) hlm. 17.

<sup>16</sup> Ah. Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai...*, hlm. 7.

<sup>17</sup> Ah. Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran*, (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2016) hlm. 17. Lihat juga Ibrahim, Linda D., *Memfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal dalam Program Kepedulian Korporasi*, (Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani, 2006), hlm. 110.

<sup>18</sup> M. Sulton Fatoni, *Modal Sosial Pesantren Studi tentang...*, hlm. 28.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data diperoleh dari pengasuh Pesantren Maslakul Huda dan pembantu pengasuh Pesantren Maslakul Huda serta masyarakat Kajen yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait. Adapun pendekatan dan sifat dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode analisis data deskriptif, yakni menggambarkan kondisi subyek dan obyek penelitian berdasarkan temuan yang ada dalam bentuk narasi deskripsi, sehingga rancang bangun penelitian dari mulai rumusan masalah hingga hasil temuan penelitian tergambar dengan jelas.

#### **D. Modal Sosial Pesantren Maslakul Huda dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Sebagaimana disebutkan oleh Zamakhsyari Dhofier, pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan sosial keagamaan dengan lima unsur di dalamnya, yakni Kyai sebagai figur sentral, santri sebagai peserta didik, asrama sebagai tempat tinggal santri, masjid sebagai pusat kegiatan atau pembelajaran dan kitab kuning sebagai materi yang dipelajari di pesantren.<sup>19</sup>

Sumber nilai bagi masyarakat pesantren utamanya terdiri dari Al Quran, Al Hadits maupun teks *Ijma'* dan *Qiyas*<sup>20</sup> yang terkodifikasi dalam kitab-kitab kuning yang diajarkan di pesantren, utamanya di pesantren tradisional. Teks-teks kitab kuning ini sendiri masih dibedakan lagi dalam beberapa kategori, kategori hukum Islam atau familiar dengan sebutan *Fiqh* –masyarakat pesantren membatasi literatur hukum Islam hanya pada empat model pemikiran (*madzhab*), yakni madzhab Imam Hanafi (699-767), Imam Malik (713-798 M), Imam Syafi'i (767-820 M), Imam Hanbali (781-855 M); untuk kajian teologi hanya dua kategori, yakni pada pemikiran Imam Asy'ari (873-935

<sup>19</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 44-45.

<sup>20</sup> *Ijma'* adalah konsensus para ulama, *qiyas* adalah pengambilan hukum secara analogis. Dua metodologi pengambilan hukum ini dibenarkan oleh sebagian besar ulama, khususnya yang beraliran *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* yang banyak diikuti di Indonesia.

M) dan Imam Maturidi (852-944 M); kategori spiritualitas (tasawuf) dibatasi hanya pada pemikiran Imam Al Ghozali (1058-1111 M) dan Imam Al Junaid (830-910 M).<sup>21</sup>

Sedangkan sumber norma bagi masyarakat pesantren adalah tradisi, adat dan budaya yang mendapat legitimasi kiai.<sup>22</sup> Peran kiai dalam mengkreasi dan melegitimasi norma masyarakat pesantren sangat dominan.<sup>23</sup> Misalnya dalam hal mengadaptasikan arus perubahan dan modernitas, kiai akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap masyarakatnya agar tidak terjadi gap antara norma-norma lama yang telah dianut dengan norma-norma baru yang datang di kemudian hari.

Adapun jaringan sosial dibangun dan dipelihara melalui jaringan lembaga pendidikan dan ekonomi. Lembaga-lembaga yang dimaksud seperti pondok pesantren, perguruan tinggi, pendidikan anak usia dini, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), unit usaha milik pesantren, serta membangun jejaring di tingkat nasional, dan lain-lain. Pada gilirannya, kapital sosial ini akan memudahkan PMH (Pesantren Maslakhul Huda) untuk mengorganisir dan mencapai tujuan-tujuannya seperti memudahkan PMH dalam menggerakkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakatnya, pengelolaan aktivitas ekonomi dalam rangka menopang kegiatan pesantren dan mendorong ekonomi rakyat serta mobilisasi bantuan sosial.

1. Nilai dan Norma dalam Masyarakat Pesantren
  - a. Figur Kiai dalam Masyarakat Pesantren sebagai Legitimasi Gagasan-Gerakan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, keberadaan kiai sebagai figur utama dalam masyarakat pesantren adalah faktor penting dan menjadi salah satu modal tersendiri bagi kesuksesan berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pesantren. Dalam hal ini, boleh diakui salah satu faktor keberhasilan diterimanya ide dan gagasan

---

<sup>21</sup> M. Sul-ton Fatoni, *Kapital Sosial Pesantren...*, hlm. 28.

<sup>22</sup> Dalam hal ini, Clifford Geertz pernah menyampaikan kritiknya mengenai figur Kiai dalam masyarakat pesantren sebagai makelar budaya, yakni figur yang menyaring (*screening*) serta menentukan boleh atau tidaknya suatu informasi dan budaya dari luar masuk. Fungsi penyaring ini akan macet yang mengakibatkan kesenjangan budaya (*cultural lag*) apabila arus informasi yang masuk kian deras dan tidak mampu disaring oleh kiai. Lihat selengkapnya Abd. Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren, Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2013), hlm. 182.

<sup>23</sup> M. Sul-ton Fatoni, *Kapital Sosial Pesantren...*, hlm. 28.

Kiai Sahal adalah adanya legitimasi dari figur kharismatik Kiai Abdullah Zain Salam atau Mbah Dullah.<sup>24</sup> Pada fase-fase awal dalam menggerakkan ide dan gagasan mengenai pemberdayaan masyarakat, pada umumnya masyarakat belum menganggap Kiai Sahal sebagai kiai besar, meskipun telah banyak diakui kedalaman ilmunya oleh beberapa kiai lain di Kajen. Hal ini karena pada masa itu, disamping Kiai Sahal masih berusia muda, beliau baru kembali menimba ilmu di Pesantren Sarang.<sup>25</sup> Ketika itu, masih ada sosok Mbah Dullah, Kiai Abdullah Rifa'i dan figur kiai-kiai lain yang dituakan di Kajen.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat pesantren pada umumnya meyakini figur Kiai (dalam hal ini Kiai yang dituakan) menjadi pembenaran dari apa yang sebelumnya dianggap berseberangan, bahkan oleh pesantren sekalipun. Dalam konteks pola relasi Kiai Sahal-Mbah Dullah ini, restu dari Mbah Dullah terhadap Kiai Sahal memiliki nilai tersendiri yang menjadikan gagasan-gerakan Kiai Sahal dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, jika Mbah Dullah sudah merestui apapun ide dan gagasan Kiai Sahal, Kiai Sahal baru merealisasikan gagasan tersebut.

- b. Mendayagunakan Modal Personal dan Profesionalitas Tata Kelola PMH, Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat.

Telah banyak diakui bahwa Kiai Sahal memiliki kemampuan akselerasi dalam menyerap berbagai disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari ragam disiplin ilmu yang dipelajari Kiai Sahal, mulai dari *Tafsir, Fiqh, Hadits, Ushul Fiqh, Taubid, Tasawuf, Mantiq, Balaghah*, dan lain-lain. Kitab Kuning yang telah ditamatkan juga sangat banyak, seperti *Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, Tahrir, Asymuni, Jaubarul Maknun, Alfiyah, Jam'ul Jawami', Al Hikam*, dan

<sup>24</sup> Beliau adalah paman Kiai Sahal. Profil KH. Abdullah Zain Salam lihat Jamal Ma'mur dkk., *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom, Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad)*, (Pati: Perguruan Islam Mathali'ul Falah, 2012), hlm. 92.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Tutik N. Jannah, pada 16 Agustus 2018.

sebagainya. Kitab-kitab itu dipelajari oleh Kiai Sahal di bawah kiai-kiai ternama kala itu terutama pamannya, Kiai Abdullah Zain Salam.<sup>26</sup>

Kemampuan Kiai Sahal dalam menyerap berbagai disiplin ilmu ini perlu dirunut pada konstruksi jejaring keilmuan Kiai Sahal, dalam hal ini adalah tempat dimana Kiai Sahal mencari ilmu, yakni Kajen, Bendo (Pare-Kediri) dan Sarang (Rembang). Sebagaimana diketahui, Kajen adalah pijakan awal Kiai Sahal dalam mencari ilmu. Di tempat ini, Kiai Sahal dibimbing langsung oleh paman beliau Kiai Abdullah Zain Salam dalam ilmu-ilmu agama dan didikan akhlak. Selain itu, Kia Sahal muda juga mengikuti kursus ilmu umum seperti filsafat, bahasa Inggris, ilmu Administrasi, Psikologi, dan tata negara dengan Kiai Amin Fauzan.<sup>27</sup> Transmisi keilmuan, didikan prinsip dan akhlak yang didapat Kiai Sahal dari Mbah Dullah ini selanjutnya menjadi pondasi dasar bagi Kiai Sahal untuk melanjutkan studinya di Bendo Kediri.

Di Bendo Pare, Kiai Sahal yang masih muda belajar tasawuf dengan Kiai Muhajir dan melakukan kunjungan kepada Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri dan Kiai Romli. Kiai Sahal juga belajar tasawuf dari Kiai Ma'ruf (sahabat Kiai Salam) serta belajar Al Hikam dengan Kiai Yahya. Setelah menyelesaikan pendidikannya selama empat tahun di Bondo, Kiai Sahal kemudian diutus Mbah Dullah untuk melanjutkan *mondok* di Sarang. Di sini, Kiai Sahal belajar ilmu *Ushul Fiqh* di Pesantren Al Anwar Sarang Rembang selama tiga tahun (1957-1960) yang diasuh secara kolektif oleh Kiai Muhammad, Kiai Imam dan Kiai Zubair.<sup>28</sup> Setelah dari Sarang ini, Kiai Sahal kemudian melanjutkan studinya di Makkah selama tiga tahun di

---

<sup>26</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal: Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 13-18. Lihat juga Jamal Ma'mur dkk., *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom...*, hlm. 113.

<sup>27</sup> Kiai Sahal sendiri kurang sependapat apabila ada perbedaan dikotomis antara ilmu agama-umum (*'ulum ad din* dan *'ulum ad dunya*). Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh pemahaman sempit istilah *tafaqqub fi ad din* sebatas *'ulum ad din* yang mengakibatkan dinamika keilmuan orang Islam hanya berkuat pada ilmu syari'at dan tasawuf saja. Di waktu bersamaan, Kiai Sahal menjelaskan definisi agama sebagai "ketentuan-ketentuan Ilahi yang mendorong siapapun yang berakal sehat untuk berbuat sesuatu yang baik bagi mereka di dunia dan akhirat." Lihat Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial...*, hlm. 307.

<sup>28</sup> Ah. Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai...*, hlm. 102.

bawah bimbingan Syaikh Yasin Al Fadani, ulama Hadis terkemuka saat itu.<sup>29</sup>

Ketiga tempat (pesantren) Kiai Sahal belajar dengan cabang ilmu yang berbeda ini, menurut Umdatul Baroroh selaku Direktur Pusat Fisi<sup>30</sup> dalam suatu kesempatan presentasi Sekolah Fiqh Sosial adalah pola filosofis Kiai Sahal dalam mencari ilmu. Pada tahap dasar, Kiai Sahal belajar akhlak dan moral sebagai materi basis. Selanjutnya di Bondo, mempelajari tasawuf terlebih dahulu sebelum kemudian mempelajari ilmu *Ushul Fiqh*. Demikian jika disimpulkan, kecerdasan Kiai Sahal tidak dapat terlepas dari tiga pesantren dimana beliau belajar.

Selain itu, Kiai Sahal sejak muda juga telah aktif di berbagai organisasi, baik sebagai anggota maupun dipercaya menjadi ketua, yang secara tidak langsung ikut membentuk konstruksi jejaring keilmuan maupun jaringan sosial. Karir Kiai Sahal dimulai ketika dipercayai memimpin Persatuan Islam Indonesia (PII) Cabang Margoyoso Pati (1947-1952), ketua Ikatan Santri Se-Karisidenan Pati di Pare Kediri (1954-1956), serta sekretaris Organisasi Persatuan Pesantren di Margoyoso (1951-1953). Ketika Kiai Sahal menginjak usia 21 tahun, beliau diberi amanah untuk memegang jabatan Ketua Forum Diskusi Fiqh (1958-1965) suatu forum yang membutuhkan keluasan khazanah intelektual serta diskursus pemikiran yang kuat.<sup>31</sup>

Di usia Kiai Sahal yang ke 26 tahun, beliau telah mendapatkan amanah besar untuk memimpin PMH sekaligus Direktur di Perguruan Islam Mathali'ul Falah, dua lembaga pendidikan berpengaruh di Kajen.

---

<sup>29</sup> Salah satu riwayat menyebutkan, dari Syaikh Yasin Al Fadani inilah Kiai Sahal mendapatkan *Ijazah 'Aamah*, atau ijazah bagi semua *fann* ilmu. Suatu pengakuan guru terhadap murid atas kemampuannya dalam menyerap ilmu yang diberikan.

<sup>30</sup> Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial adalah lembaga kajian dan penelitian yang ada di IPMAFA. Lembaga ini banyak mengembangkan kajian-kajian kritis dan penelitian utamanya berkaitan dengan tentang pesantren dan Fiqh Sosial Kiai Sahal.

<sup>31</sup> Ah. Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai...*, hlm. 103.

Pada masa ini pula Kiai Sahal kemudian mentransformasikan nilai-nilai pesantren mulai digalakkan.<sup>32</sup>

Selain memiliki kemampuan menyerap berbagai disiplin ilmu dengan sangat baik, Kiai Sahal dikenal sebagai figur yang sangat memegang teguh prinsip-prinsip dalam memimpin, mengatur dan mengelola PMH maupun lembaga-lembaga lain secara profesional. Dalam hal profesionalisme tata kelola PMH, dapat dilihat dari ketika Kiai Sahal memulainya dari hal yang sangat kecil, yakni kedisiplinan dalam memisahkan uang pribadi dan uang pesantren. Dari kedisiplinan ini maka kemudian Kiai Sahal memberikan batasan tegas antara uang milik pribadi hanya digunakan untuk keperluan pribadi.<sup>33</sup> Begitupun sebaliknya, semua yang dipakai oleh santri adalah dari uang yang santri bayarkan, adapun jika terdapat uang lebih, maka kelebihan tersebut yang digunakan untuk membangun pesantren. Sebagaimana disampaikan Tutik N. Jannah:

“Jadi santri sampai saat ini tetap membayar, karena jika digratiskan, akan menjadi tidak bertanggung jawab. Termasuk, *nyuwun sewu* (mohon maaf), kalau ada saudaranya *mondok* di PMH tidak digratiskan, tapi diberi uang oleh Kiai Sahal agar membayar kepada pesantren. *Yo kan sakjane niku lucu to ya*, tapi seperti itu.”<sup>34</sup>

Contoh lain bagaimana prinsip Kiai Sahal dalam memimpin PMH juga disampaikan oleh Tutik N. Jannah:

“Bahkan Kiai Sahal itu kalau ada orang datang, misalkan Kiai Sahal duduk di depan rumah, *kok* ada orang datang *moro-moro salaman* (datang-datang bersalaman), ‘Yai, *niki titip damel* pesantren’ (Kiai, ini titip buat pesantren) meskipun itu Rp. 10.000 *mesti* (pasti) diserahkan bendahara pondok (tidak diterima langsung oleh Kiai Sahal).”<sup>35</sup>

Demikian adalah beberapa diantaranya contoh yang disampaikan, bagaimana Kiai Sahal sangat berhati-hati dalam berprinsip, bahkan pada

---

<sup>32</sup> Ah. Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai...*, hlm. 103.

<sup>33</sup> Pada kesempatan wawancara yang sama, Ibu Tutik N. Jannah menceritakan, bahkan Kiai Sahal dulu pernah melarang KH. Abdul Ghofarrozin membangun rumah terlebih dahulu sebelum membangun PMH, hal ini untuk menghindari prasangka menggunakan uang pesantren untuk membangun rumah oleh masyarakat.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Tutik N. Jannah, pada 16 Agustus 2018.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Tutik N. Jannah, pada 16 Agustus 2018.

hal-hal yang sangat kecil dan sepele, sehingga kemudian dapat mengakumulasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi PMH.

## 2. Jaringan Sosial sebagai Pendukung dan Penopang Gagasan.

Jaringan sosial secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu interaksi satu orang atau lebih baik melakukan kontak maupun komunikasi. Dalam kapital sosial, jaringan sosial ini terbagi ke dalam dua dimensi, dimensi *bonding* dan *bridging*. Dalam aspek *bridging*, jaringan sosial PMH telah terbangun luas dan terkonstruksi dengan berbagai Lembaga-lembaga Pemerintahan, Lembaga Kajian dan Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun berjejaring dengan masyarakat pada umumnya.

Seperti contohnya ketika Kiai Sahal dan PMH menjalin kerjasama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) pimpinan Dawam Raharjo pada tahun 1979. Bentuk konkret dari kerjasama yang terjalin ini kemudian melahirkan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang menjadi motor penggerak pemberdayaan di ranah akar rumput masyarakat.<sup>36</sup> Kerjasama ini tidak terlepas dari peranan Gus Dur dan Gus Mus sebagai pintu masuk bagi Kiai Sahal yang kemudian bisa memasukkan nilai-nilai pesantren melalui gerakan-gerakan melalui LP3ES.<sup>37</sup>

Sedangkan dalam aspek *bonding*, jaringan sosial PMH telah mengakar kuat pada pendirian lembaga-lembaga operasional baik di bidang pendidikan maupun bidang ekonomi atau unit usaha milik pesantren. Saat ini, sebagai institusi pesantren yang maju dan mengalami perkembangan yang sangat pesat, PMH telah banyak memiliki lembaga lain yang berada di bawah naungan pesantren dan membentuk suatu jaringan lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Pesantren Maslakul Huda. Jaringan antar lembaga yang berdiri di bawah naungan pesantren ini difungsikan sebagai operasionalisasi kegiatan di tingkat teknis. Lembaga Operasional (LO) milik PMH terbagi ke dalam dua bidang, yakni pendidikan dan unit usaha. Di bidang pendidikan, PMH memiliki

<sup>36</sup> Wawancara dengan Tutik N. Jannah, 26 Juli 2018. Lihat juga Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kiai dan Peantren Jawa Pesisiran*, (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2017), hlm. 116.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Tutik N. Jannah, pada 16 Agustus 2018.

LO seperti Pesantren Maslakul Huda Putra, Pesantren Putri Al Badi'iyah, PMH lil Muftadi'in, PMH lil Muftadi'at sebagai penyelenggara operasional pendidikan pesantren nonformal dan Ma'had 'Aly Maslakul Huda sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren, serta PAUD dan SD An Nismah keduanya adalah lembaga penyelenggara pendidikan formal dengan sistem *Full Day School*.

Sedangkan di bidang unit usaha, PMH memiliki LO PT. BPR Artha Huda Abadi, PT. BPRS Artha Mas Abadi, keduanya bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan, CV. Mabadi Sejahtera, Masda Digital Printing dan Masda Grafika yang bergerak di bidang jasa percetakan dan penerbitan, serta Masda Catering yang bergerak di bidang jasa makanan dan katering.<sup>38</sup>

## E. Penutup

Secara desain makro, gagasan Kiai Sahal terfokus pada tiga bidang garap, yakni pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Gagasan-gagasan ini kemudian dirupakan menjadi institusi dengan mekanisme, sistem dan tata kelola profesional. Institusi-institusi yang berdiri – yang menjadi penggerak-pelaksana gagasan besar Kiai Sahal – adalah ikatan (*bonding*) dalam jejaring sosial yang dibangun Kiai Sahal-PMH yang pada tahap selanjutnya menjadi modal membangun kepercayaan masyarakat.

Indikator dari kesejahteraan masyarakat disini diawali dengan adanya kemauan untuk menggeser paradigma yang lama dan menggantinya dengan paradigma baru yang solutif, progresif dan dinamis dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, hal ini dibuktikan dengan diterimanya – meskipun tidak semua – gagasan pengembangan masyarakat oleh beberapa pesantren dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, gagasan-gerakan yang dilakukan oleh Kiai Sahal-PMH turut berkontribusi bagi tumbuhnya kemandirian dalam masyarakat pesantren, kesadaran untuk berorganisasi dan tumbuhnya kreativitas-kreativitas di masyarakat paling bawah, dibuktikan dengan terbentuknya berbagai Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah terorganisir dan memudahkan BPPM-PMH melakukan kegiatan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Tutik N. Jannah, pada 16 Agustus 2018.

pemberdayaan masyarakat. Pada tahap akhir, gagasan-gerakan Kiai Sahal dan Pesantren Maslakul Huda ini akan membawa harapan baru bagi masyarakat, yakni mengeskalasi kehidupan menuju kesejahteraan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Asmani, Jamal Ma'mur, dkk. 2012, *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom, Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad)*. Pati: Perguruan Islam Mathali'ul Falah.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2007, *Fiqh Sosial Kiai Sabal: Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016, *Peran Pesantren dalam Kemerdekaan dan Menjaga NKRI*. Yogyakarta: Aswajaperindo.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994, *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Field, John. 2008. *Social Capital*. Canada: Roudledge.
- Fukuyama, Francis. 1995, *Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Ghufron, Muhammad. 2017, *Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Toleransi dalam Relasi Sosial Sunni-Syiah di Perkampungan Candi Desa Banjaran Jepara*, Skripsi, (Pati: Institut Pesantren Mathali'ul Falah.
- Ibrahim, Linda D. 2006, *Memfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal dalam Program Kepedulian Korporasi*, Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani.
- Mahfudh, Sahal. 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Soebahar, Abd. Halim. 2013, *Modernisasi Pesantren, Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Sulaiman, Rusydi. 2016, *Pendidikan Pondok Pesantren*. Jurnal 'Anil Islam Vol. 1. Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman.
- Sulton Fatoni, Muhammad. 2015, *Kapital Sosial Pesantren, Studi tentang Komunitas Pesantren Sidogiri Jawa Timur*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Zaenurrosyid, Ahmad. 2016, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran*. Wonosobo: Mangku Bumi Media.
- Zubaedi. 2007, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sabal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.